

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Eldis Ramdani dan Neo Agustina dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.” Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI atas pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan. Pengumpulan data menggunakan angket dengan sample sebanyak 70. Metode dalam pembagian angket dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada SKPD kabupaten Aceh Utara. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian, dalam penelitian ini objek penelitiannya seluruh SKPD pada kabupaten Aceh Utara sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan objek penelitiannya pada Badan Keuangan Daerah Parepare. Variabel penelitian, dalam penelitian yang akan dilakukan akuntabilitas diukur dengan variabel transparansi, standar kinerja. Selain itu yang membedakan dari aspek tempat dan waktu penelitian.<sup>1</sup>

Raja Rika Anggraini dengan judul penelitian “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep *Value*

---

<sup>1</sup> Eldis Ramdani dan Neo Agustina, ‘Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara,’ *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan* 5, No. 1, 2019, h. 1.

*For Money* Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru).” Pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan anggaran dengan konsep *value for money*, dimana jenis datanya berupa data primer dengan membagikan kuesioner secara langsung ke 43 SKPD yang ada di kota Pekanbaru, ada sebanyak 172 sample yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Data diolah menggunakan SPSS dengan analisis regresi dan asumsi klasik. Hasil dari penelitian ini, Akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Akuntabilitas publik dan pengawasan sebagai variabel moderating berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*, sedangkan transparansi sebagai variabel moderating tidak berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu objek penelitian, penelitian yang akan dilakukan pada Badan Keuangan Daerah. Variabel penelitian, dalam penelitian yang akan dilakukan akuntabilitas diukur dengan variabel standar kinerja dan transparansi. Selain itu yang membedakan dari aspek tempat dan waktu penelitian dan juga tempat dan waktu penelitian.<sup>2</sup>

Arif Ardi Kusumah dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (survei pada SKPD/ OPD Pemerintahan kota Tasikmalaya). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SAP dan kualitas laporan SKPD kota Tasikmalaya. Pengambilan data

---

<sup>2</sup> Raja Rika Anggraini, ‘Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep *Value For Money* Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru),’ *Jurnal Fekon* 4, No. 2, 2017. H. 2780.

dilakukan secara langsung ke lapangan (data primer) dengan membagikan kuesioner. Data yang diperoleh di analisis menggunakan uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD/OPD di Pemerintahan kota Tasikmalaya. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu objek penelitian akan dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Parepare. Variabel penelitian, dalam penelitian yang akan dilakukan akuntabilitas diukur dengan variabel transparansi, standar kinerja. Selain itu yang membedakan dari aspek tempat dan waktu penelitian.<sup>3</sup>

Muhammad Ichlas, Hasan Basri, dan Muhammad Arfan dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama terhadap akuntabilitas laporan keuangannya. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer yaitu dengan membagikan kuesioner kepada 26 responden dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) yang kemudian data tersebut akan di uji menggunakan uji validitas dan reliabilitas serta uji hipotesis. Adapun hasil penelitian yang di peroleh bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah kota Banda Aceh.

---

<sup>3</sup> Arif Ardi Kusuma, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya),' *Jurnal Akuntansi*, 2010, h.1.

Adapun perbedaan dengan penelitian akan dilakukan dalam aspek objek penelitiannya pada Badan Keuangan Daerah Parepare. Variabel penelitian, dalam penelitian yang akan dilakukan akuntabilitas diukur dengan variabel transparansi dan standar kinerja. Selain itu yang membedakan dari aspek tempat dan waktu penelitian.<sup>4</sup>

Rita Fitriyani dengan judul penelitian Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi (Studi Kasus Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bukti secara empiris jika desentralisasi fiskal, *good governance*, dan penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah di kota Jambi. Penelitian ini menggunakan data primer, dengan membangikan kuesioner kepada pegawai negeri sipil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambil. Pengambilan sample menggunakan teknik judgement sampling yang kemudian datanya akan di olah menggunakan SPSS untuk di uji analisis regresi dan uji hipotesis. Desentralisasi fiskal, *Good governance*, dan standar akuntansi Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah daerah kota Jambi. Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah kota Jambi. *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah kota Jambi. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah kota Jambi. Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu objek penelitiannya pada Badan

---

<sup>4</sup> Muhammad Ichlas, Hasan Basri, dan Muhammad Arfan, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh,' *Jurnal Magister Akuntansi* 3, No.4, 2014, h. 76.

Keuangan Daerah Parepare. Variabel penelitian, dalam penelitian yang akan dilakukan akuntabilitas diukur dengan variabel transparansi dan standar kinerja. Selain itu yang membedakan dari aspek tempat dan waktu penelitian.<sup>5</sup>

Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini mengambil data menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sample sebanyak 38 responden yang akan diolah menggunakan SPSS. Adapun hasil yang diperoleh yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan tidak adanya hubungan moderasi antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan objek penelitiannya pada Badan Keuangan Daerah Parepare. Variabel penelitian, dalam penelitian yang akan

---

<sup>5</sup> Rita Fitriyan, 'Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi (Studi Kasus Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi),' *Jurnal Sains Sosiohumaniora 1*, No. 2, 2017, h. 142.

dilakukan akuntabilitas diukur dengan variabel transparansi dan standar kinerja. Selain itu yang membedakan dari aspek tempat dan waktu penelitian.<sup>6</sup>

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Akuntabilitas

Menurut Elvira Akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraannya dapat diketahui jika pemerintah memberitahukan kepada masyarakat mengenai sumber daya dan sumber dana beserta penggunaannya,<sup>7</sup> sebab itulah dibutuhkan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah dalam perwujudan pelaksanaan akuntabilitas yang wajib untuk dilalukan semua pemerintah daerah maupun pusat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi, Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.<sup>8</sup> Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dengan mengungkapkan kinerja secara finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Dengan kata lain, akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kepada rakyat terhadap segala sumber daya yang digunakan dalam aktivitasnya.

Menurut Elvira Akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraannya dapat diketahui jika pemerintah memberitahukan kepada masyarakat mengenai sumber

---

<sup>6</sup> Daniel dan Yohanes, 'pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual),' *Jurnal Stie Semarang*, 5, No. 3, 2013 h.93.

<sup>7</sup> Elvira zeyn, 'Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan,' *Jurnal Trikomonika*, 10 No.1, 2011, h.55.

<sup>8</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 Lampiran II.01 Tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah*, h.7.

daya dan sumber dana beserta penggunaannya,<sup>9</sup> sebab itulah dibutuhkan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah dalam perwujudan penerapan akuntabilitas.

Menurut Mardiasmo ada dua macam akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada atasan atau pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi misalnya pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban kepada pihak yang setara dengan institusi atau staf, masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat, serta pihak yang membutuhkan informasi keuangan seperti mahasiswa dalam penelitiannya.<sup>10</sup> Dengan adanya pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah kepada semua pihak membuat akuntabilitas suatu lembaga semakin baik dan menciptakan citra yang semakin baik itu pemerintah daerah.

Ada 2 prasyarat terbangunnya akuntabilitas yaitu:<sup>11</sup>

- a. Adanya transparansi para penyelenggara dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen.
- b. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Akuntabilitas publik memiliki beberapa macam akuntabilitas salah satunya adalah akuntabilitas keuangan yang akan di untuk penelitian ini. Akuntabilitas

---

<sup>9</sup> Elvira zeyn, 'Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan,' *Jurnal Trikomonika*, 10 No.1, 2011, h.55.

<sup>10</sup> Anggi, Intiyas dan Ika, 'Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Potensi *Whistleblowing* Atas Penyalahgunaan Dana,' t.th.

<sup>11</sup> Rakhmat, *Administrasi dan Akuntabilitas Publik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), h. 140.

keuangan mengharuskan pemerintah untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk gambaran terhadap kondisi finansial kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga publik mengenai dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, tidak adanya pemborosan dan kebocoran data, serta korupsi.<sup>12</sup> Dengan adanya penerapan akuntabilitas keuangan menghindarkan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pegawai yang tidak bertanggungjawab.

Tahap-tahap akuntabilitas keuangan dalam Elvita yaitu Perumusan rencana atau proses penganggaran, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporan.<sup>13</sup> Point-point yang ada dalam tahapan ini akan dimuat dalam laporan keuangan sehingga memudahkan para pengguna untuk melihat proses suatu kegiatan pemerintah dalam periode tertentu.

Menurut Ravika, indikator akuntabilitas paling minimal mencakup adanya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar prosedur pelaksanaan kegiatan tersebut; kelalaian dan kesalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan akan diberikan konsekuensi berupa sanksi; dan adanya output dan outcome yang terukur.<sup>14</sup> Sedangkan indikator pada akuntabilitas finansial menurut Yuli meliputi Integritas Keuangan, dimana laporan keuangan menyajikan data yang berdasarkan fakta; Pengungkapan, dalam hal ini setiap instansi diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan sebagai gambaran terhadap seluruh kegiatan organisasi selama satu periode

---

<sup>12</sup> Elvira Zeyn, 'Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan,' h.55.

<sup>13</sup> Elvira Zeyn, 'Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan,' h.56.

<sup>14</sup> Ravika Permata Hari, 'Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Wilayah Sumatera,' *Jurnal Akuntansi*, 12 No.2, 2018, h. 78.

dengan melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi agar lebih mudah untuk di pertanggungjawabkan; Ketaatan, penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan tanggungjawab, keadilan dan kebenaran sehingga laporan yang dihasilkan benar, jelas, informastif dan terhindar dari unsur manipulasi.<sup>15</sup>

Akuntabilitas akan terwujud jika terdapat transparansi dalam pembuatan laporan keuangan. Menurut Sopanah, ciri-ciri pemerintah yang akuntabel yaitu:<sup>16</sup>

- a. Penyajian informasi secara cepat, tepat dan terbuka kepada masyarakat,
- b. Memberikan pelayanan dengan baik dan memuaskan bagi masyarakat,
- c. Memberikan ruang kepada publik untuk terlibat dalam proses pemerintahan dan pembangunan,
- d. Dapat mempertanggungjawabkan dan menjelaskan setiap kebijakan kepada masyarakat,
- e. Memiliki sarana publik untuk menilai pencapaian pemerintah.

## 2. Teori Akuntansi Berbasis Syariah

Akuntansi Syariah terdiri atas dua kata yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi menurut *American Accounting Association* akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Yuli Handayani, 'Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi pada 9 Partai Politik di Kota Bandung),' (*Skripsi Sarjana; Ekonomi: Bandung, 2015*), h. 30.

<sup>16</sup> Anggi, Intiyas dan Ika, 'Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Potensi *Whistleblowing* Atas Penyalahgunaan Dana,' t.th.

<sup>17</sup> Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba empat, 2015), h.1.

Sedangkan Syariah adalah segala aturan ditetapkan oleh Allah swt. untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari selama di dunia. Oleh karena itu, Akuntansi Berbasis Syariah adalah proses akuntansi yang memberikan informasi yang tepat (tidak terbatas pada data keuangan saja) kepada para stakeholder yang juga memungkinkan mereka untuk mengawasi bahwa entitas tetap berjalan sesuai dengan syariah islam dan diterapkan dalam kegiatan sosial ekonomi.<sup>18</sup>

Prinsip syariah yang menjadi prinsip dasar dalam akuntansi operasional akuntansi yaitu:<sup>19</sup>

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sangat berkaitan dengan Amanah, dalam hal ini yang dimaksud merupakan amanah dalam menanggung akibat atau mempertanggungjawabkan setiap hal yang dilakukan. Impikasi dalam dunia bisnis khususnya akuntansi yaitu setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan oleh pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan sangat penting dalam etika sosial dan bisnis. Keadilan merupakan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Implikasi dalam akuntansi yaitu memegang erat prinsip pada nilai-nilai syariah dimana pencatatan dilakukan dengan benar pada setiap transaksi yang dilakukan, mengukur secara adil, tidak dilebihkan maupun dikurangi.

---

2. <sup>18</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba empat, 2019), h.

<sup>19</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 11.

### c. Prinsip Kebenaran

Kebenaran dalam akuntansi merupakan kesesuaian antara transaksi-transaksi yang dicatat dan yang dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dalam prinsip kebenaran menyangkut pengukuran terhadap aset, utang, modal pendapatan, biaya, laba, dan laporan keuangan hingga seorang akuntan dalam praktek wajib mengukur semua secara bertanggungjawab, benar, dan adil berdasarkan bukti.

Uraian di atas menunjukkan, dalam menyusun laporan keuangan harus didasarkan pada sifat yang baik, jujur, dapat di percaya dan juga adil sehingga seorang akuntan wajib untuk melaporkan semua transaksi yang terjadi sesuai fakta, teliti dan sesuai dengan syariah islam. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S An Nisa/4: 135 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
تَعَدَّلُوا ۗ (١٣٥) وَالْأَقْرَبِينَ ۗ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ  
وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali –Art, 2004)

Perbedaan dari akuntansi syariah dan akuntansi konvensional dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu:<sup>21</sup>

- a. Dasar Hukum, akuntansi syariah dasar hukumnya bersumber dari Al-Quran, dan sunnah. Sedangkan akuntansi konvensional dasar hukumnya bersumber pada hukum bisnis modern.
  - b. Dasar Tindakan, akuntansi syariah tindakannya didasarkan pada keberadaan hukum Allah (keagamaan) sedangkan akuntansi konvensional tindakannya didasarkan pada rasionalisme ekonomis (sekuler).
  - c. Tujuan, setiap kegiatan ekonomi tidak lepas dari yang namanya keuntungan. Namun tujuan pada akuntansi syariah adalah memperoleh keuntungan yang wajar sedangkan pada akuntansi konvensional lebih memilih untuk memaksimalkan keuntungan dengan pengeluaran yang sedikit.
  - d. Orientasi, akuntansi syariah berorientasi pada masyarakat sedangkan akuntansi konvensional menitikberatkan pada kepemilikan pribadi atau individual.
  - e. Tahapan Operasional, akuntansi syariah dalam penyusunannya dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah sedangkan akuntansi konvensional pada dasarnya tidak dibatasi kecuali adanya pertimbangan yang ekonomis.
3. Teori Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik merupakan suatu entitas yang menghasilkan barang dan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik.<sup>22</sup> Akuntansi sektor publik adalah suatu

<sup>21</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, h. 2.

<sup>22</sup> Yulia Mujiaty dan Lativa. *Modul Akuntansi Sektor Publik*. <https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/240267/Cover-akuntansi-sektor-publik-dan-modul.pdf> (20 Desember 2020). h. 36.

bidang akuntansi yang digunakan dalam lembaga sektor publik. Lembaga sektor publik yang dimaksud yaitu pemerintah, yayasan, partai politik dan semua lembaga yang bertujuan untuk menghasilkan layanan publik dalam pengorasiannya. Akuntansi dalam sektor publik memiliki peran yang sangat penting. Dengan akuntansi, informasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam pengalokasian sumber daya, penyusunan program dan juga dijadikan sebagai alat untuk mengukur kinerja setiap pegawai. Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ini dapat dilihat dari akuntansi sektor publik yang terus mengalami perubahan-perubahan dalam menghasilkan sistem akuntansi yang lebih baik. Perubahan sistem akuntansi yang dimaksudkan sebagai contoh perubahan sistem akuntansi dari basis kas menjadi akuntansi basis akrual. Basis kas merupakan pencatatan pendapatan atau biaya pada saat kas diterima atau dibayar oleh/dari kas pemerintah. Sedangkan basis akrual merupakan pencatatan yang dicatat dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan tersebut terjadi dan bukan saat kas diterima ataupun dibayarkan.<sup>23</sup>

Perkembangan lainnya dapat dilihat regulasi yang mulai muncul dalam pengaturan penerapan akuntansi sektor publik khusus di pemerintahan. Perkembangan sektor publik ini meliputi bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan pemeriksaan (auditing). Namun dalam penelitian ini akan berfokus pada akuntansi keuangan.

---

<sup>23</sup> Kemenkeu Learning Center. 'Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat: Perbedaan Basis Kas dan Basis Akrual.' *Situs Resmi Kemenkeu Learning Center*. <https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-sistem-akuntansi-dan-pelaporan-keuangan-pemerintah-pusat-perbedaan-basis-kas-dan-basis-akrual/> (20 Desember 2020).

Perkembangan akuntansi keuangan sektor publik di pemerintahan ditandai dengan adanya standar akuntansi pemerintah untuk mendorong penerapan akuntansi keuangan yang lebih baik lagi.<sup>24</sup> Adapun hambatan yang dihadapi oleh akuntansi sektor publik dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal yaitu:<sup>25</sup>

- a. Objektivitas, masalah objektivitas merupakan masalah utama dalam penyusunan laporan keuangan yang menjadi penilaian kinerja suatu instansi hal ini dikarenakan adanya kepentingan antara manajemen dan juga stakeholder yang bertolak belakang sehingga mempengaruhi objektivitas suatu laporan.
- b. Konsistensi, konsistensi yang dimaksudkan disini yaitu teknik akuntansi yang digunakan harus konsisten dan tidak boleh berubah-ubah dalam penyusunan laporan keuangan dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi lainnya.
- c. Daya banding, setiap laporan keuangan yang telah dibuat dapat di bandingkan dengan instansi atau organisasi lain untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja suatu organisasi.
- d. Tepat waktu, laporan keuangan harus disajikan dengan tepat waktu hal ini dikarenakan informasi dalam laporan keuangan akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun seringkali laporan keuangan disajikan tidak tepat waktu dikarena kebutuhan informasi yang banyak sehingga memakan waktu yang lumayan lama.

---

<sup>24</sup> Haryanto, *et al.*, eds, *Akuntansi Sektor Publik*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), h. 2.

<sup>25</sup> Yulia Mujiaty dan Lativa, *Modul Akuntansi Sektor Publik*. <https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/240267/Cover-akuntansi-sektor-publik-dan-modul.pdf> (20 Desember 2020), h. 26.

- e. Ekonomis dalam penyajian laporan keuangan, semakin banyak informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan maka semakin banyak pula waktu waktu dan biaya yang dibutuhkan sehingga dalam penyusunan laporan keuangan manfaat yang didapat harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan laporan keuangan tersebut.

Melihat dari hambatan tersebut maka standar akuntansi pemerintah sebagai dasar acuan penyusunan laporan keuangan diharapkan menjadikan laporan keuangan pemerintah menjadi relevan dan andal sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun horizontal.

#### 4. Teori Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintah merupakan standar yang digunakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum. Selain itu, standar akuntansi pemerintah ini akan menjadi pedoman untuk para pengguna laporan keuangan untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas.<sup>26</sup> Standar Akuntansi Pemerintah telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi disebutkan dalam PP No.71 Tahun 2010 dengan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, *Akuntansi Sektor Publik*, (Semarang: Badan Penerbit Diponegoro, 2007), h. 3.

<sup>27</sup> Rina Maulina dan Lisa Fatmi, 'Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap), Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Sip) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah', *Jurnal Akbis 2 No.1*, 2018 h.51.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah disusun oleh KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintah) yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).<sup>28</sup> Dalam Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dilandasi oleh kerangka konseptual Akuntansi pemerintah. Adapun Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan didasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang meliputi:

- a. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan
- b. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran
- c. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas
- d. PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
- e. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan
- f. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi
- g. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap
- h. PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
- i. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban
- j. PSAP No. 10 Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- k. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
- l. PSAP No. 12 Laporan Operasional

---

<sup>28</sup> Presiden Republik Indonesia, *Penjelasan Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010*.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum di atur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.<sup>29</sup> Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraf 28 menjelaskan bahwa laporan keuangan pokok yang harus disajikan oleh pemerintah meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.<sup>30</sup> Pemerintah merupakan entitas nirlaba atau non profit sehingga tidak membutuhkan Laporan Laba/Rugi.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraf 41-55 yaitu:<sup>31</sup>

- a. Prinsip Basis Akuntansi, yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.
- b. Prinsip Nilai Historis, Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas

---

<sup>29</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010*, bab 1, pasal 1.

<sup>30</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010* Lampiran I.01 Tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, h.8.

<sup>31</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010* Lampiran I.01, h.12-14.

- yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
- c. Prinsip Realisasi, Bagi pemerintah pendapatan basis kas yang tersedia telah di otorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi kan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah otorisasi melalui anggaran dan telah menambah dan mengurangi kas.
  - d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal, Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.
  - e. Prinsip Priodisitas, Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan namun periode bulanan, triwulan dan semester juga diajurkan.
  - f. Prinsip Konsistensi, perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode lainnya.

- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap, Laporan keuangan disajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna informasi laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
- h. Prinsip Penyajian Wajar, Laporan keuangan menyajikan secara wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, diperbolehkan menggunakan basis kas menuju akrual dalam jangka waktu tertentu setelah tahun anggaran 2010, kebijakan ini diberikan untuk daerah yang belum siap sepenuhnya dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Namun, saat ini setiap daerah sudah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual karena telah lebih dari empat tahun anggaran yang merupakan tanggal efektif dalam penerapannya.<sup>32</sup>

Penerapan standar akuntansi berbasis akrual ini, laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan untuk memberikan manfaat yang lebih banyak untuk orang-orang berkepentingan akan informasi yang disajikan dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

## 5. Teori Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, menjelaskan bahwa transparansi merupakan memberikan informasi keuangan kepada masyarakat secara

---

<sup>32</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010* Lampiran I.01, h.7.

terbuka dan jujur dengan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah terhadap sumber daya yang mereka percayakan untuk dikelola dan ketaatan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Menurut Mahlel, Ridwan dan Nasirwan, tujuan transparansi yang dapat dirasakan pihak berkepentingan dalam pengelolaan keuangan yaitu:<sup>34</sup>

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan dilandasi kesadaran masyarakat sebagai bentuk dari kontrol sosial.
- b. Menghindari perbedaan persepsi
- c. Mendorong masyarakat dalam bertanggungjawab dan bertanggung gugat terhadap keputusannya.
- d. Membangun kepercayaan semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan.

Menurut Mardiasmo dalam Yuli transparansi memiliki karakteristik yang meliputi:<sup>35</sup>

- a. Informatif, dengan memberikan informasi berupa prosedur, data, fakta dan sebagainya kepada stakeholder yang membutuhkan secara akurat, jelas, tepat waktu, mudah diakses, dapat diperbandingkan dan memadai.
- b. Pengungkapan, pengungkapan yang dilakukan kepada masyarakat atas aktifitas dan kinerja finansial yang meliputi kondisi keuangan, susunan pengurus, dan bentuk perencanaan dari hasil kegiatan.

---

<sup>33</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010* Lampiran I.01, h.7.

<sup>34</sup> Mahlel, Ridwan dan Nasirwan, 'Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil,' *J-EBIS 2 no. 2*, 2016, h.9.

<sup>35</sup> Yuli Handayani, 'Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi pada 9 Partai Politik di Kota Bandung),' (*Skripsi Sarjana; Ekonomi: Bandung, 2015*), h. 20.

Sejalan dengan tujuan di atas, saat ini banyak persepsi masyarakat yang terbentuk secara negatif sebagai bentuk respon terhadap kasus-kasus yang menyangkut banyaknya pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah yang menggunakan dana publik. Persepsi yang berkembang di masyarakat yaitu pemerintah yang korup terhadap dana publik. Dengan adanya transparansi ini dapat mematahkan persepsi tersebut dan memperoleh kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dilakukan secara jujur, terbuka, profesional dan terhindar dari tindak korupsi.

Menurut Mardiasmo dalam Raja, transparansi akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dan masyarakat sehingga menciptakan pemerintah daerah yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel serta responsif terhadap aspirasi rakyat.<sup>36</sup> Akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang saling berkaitan, dengan adanya transparansi akan menciptakan akuntabilitas sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana publik.

Faktor-faktor yang mendesak dilakukannya transparansi keuangan oleh pemerintah daerah yaitu adanya tuntutan publik dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja publik; semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya peran dalam mengawasi dan mendorong pemberantasan korupsi; kemajuan teknologi yang semakin memudahkan pelaksanaan transparansi; ditetapkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; dan kebebasan menyatakan

---

<sup>36</sup> Raja Rika Anggraini, 'Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep *Value For Money* Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderating,' *JOM Fekon 4 No. 1*, 2017, h.2783.

pendapat sehingga masyarakat memiliki kebebasan menuntut hak-hak publik baik secara lisan maupun tulisan.<sup>37</sup>

Banyaknya regulasi yang telah mengatur masalah transparansi menyebabkan transparansi menjadi hal yang sangat wajib untuk dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi, kepercayaan masyarakat, dan profesionalisme dalam mengelola semua sumber daya yang dipercayakan masyarakat kepada pemerintah daerah.

## 6. Teori Standar Kinerja

Standar kinerja juga merupakan salah satu syarat terciptanya akuntabilitas. Menurut Abdul Halim dalam Margaretha, Kinerja merupakan prestasi kerja dan proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.<sup>38</sup> Kinerja biasanya berfokus pada input, output, outcome sehingga dalam penilaian dan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan hal-hal yang membentuk kinerja tersebut. Dalam Achmad, menyatakan Studi yang dilakukan oleh IFAC sektor publik menjelaskan bahwa pelaporan keuangan dengan basis akuntansi akrual dapat mengevaluasi kinerja pemerintah yang sehubungan dengan biaya layanan jasa, pencapaian tujuan dan efisiensi.<sup>39</sup>

Penilaian dan pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut yang menjadi alat ukur untuk menilai apakah program berjalan secara

---

<sup>37</sup> Agustinus salle, 'Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,' *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, t.th.

<sup>38</sup> Margaretha Hendriani Y, 'Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul,' (*Skripsi Sarjana; Akuntansi: Yogyakarta, 2011*), h. 21.

<sup>39</sup> Achmad Rafiuddi Muizz, 'Analisis Hubungan Tingkat Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah,' *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, h. 4.

efektif atau tidak. Indikator kinerja dalam Margaretha, meliputi *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak). Adapun informasi yang dibutuhkan dalam mengukur kinerja yaitu:<sup>40</sup>

- a. Informasi finansial, yang diukur melalui anggaran yang telah dibuat. Penilaian dilakukan dengan mengalisis perbedaan antara kinerja aktual dengan anggaran yang dianggarkan.
- b. Informasi non finansial, penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan publik dan memperbaiki akuntabilitas.

### C. Tinjauan Konseptual

#### 1. Akuntabilitas

Ilmu akuntansi, akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjelasan, dimana organisasi menjelaskan segala kondisi baik terhadap keputusan yang diambil maupun berbagai aktivitas yang dilakukan.<sup>41</sup>

#### 2. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan

---

<sup>40</sup> Margaretha Hendriani Y, 'Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul,' (*Skripsi Sarjana; Akuntansi: Yogyakarta, 2011*), h. 23.

<sup>41</sup>"Akuntabilitas," Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban> (28 Desember 2020).

akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.<sup>42</sup>

### 3. Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan pada ketentuan syariah dalam segala penyelesaian permasalahan, yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi yang meliputi prinsip pertanggungjawaban, prinsip kebenaran dan prinsip keadilan.<sup>43</sup>

### 4. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melakukan segala hal sehubungan dengan kegiatan organisasi yang meliputi keterbukaan terhadap informasi, komunikasi bahkan dalam hal budgeting atau keuangan.<sup>44</sup>

### 5. Standar Kinerja

Standar kinerja adalah target, sasaran, tujuan upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan harus mengarahkan semua tenaga, pikiran, ketrampilan, pengetahuan, dan waktu kerjanya untuk mencapai apa yang ditentukan oleh standar kinerja.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> “Standar Akuntansi Pemerintahan,” Ensiklopedia Kementerian Keuangan, <https://www.wikiapbn.org/standar-akuntansi-pemerintahan/> (28 Desember 2020).

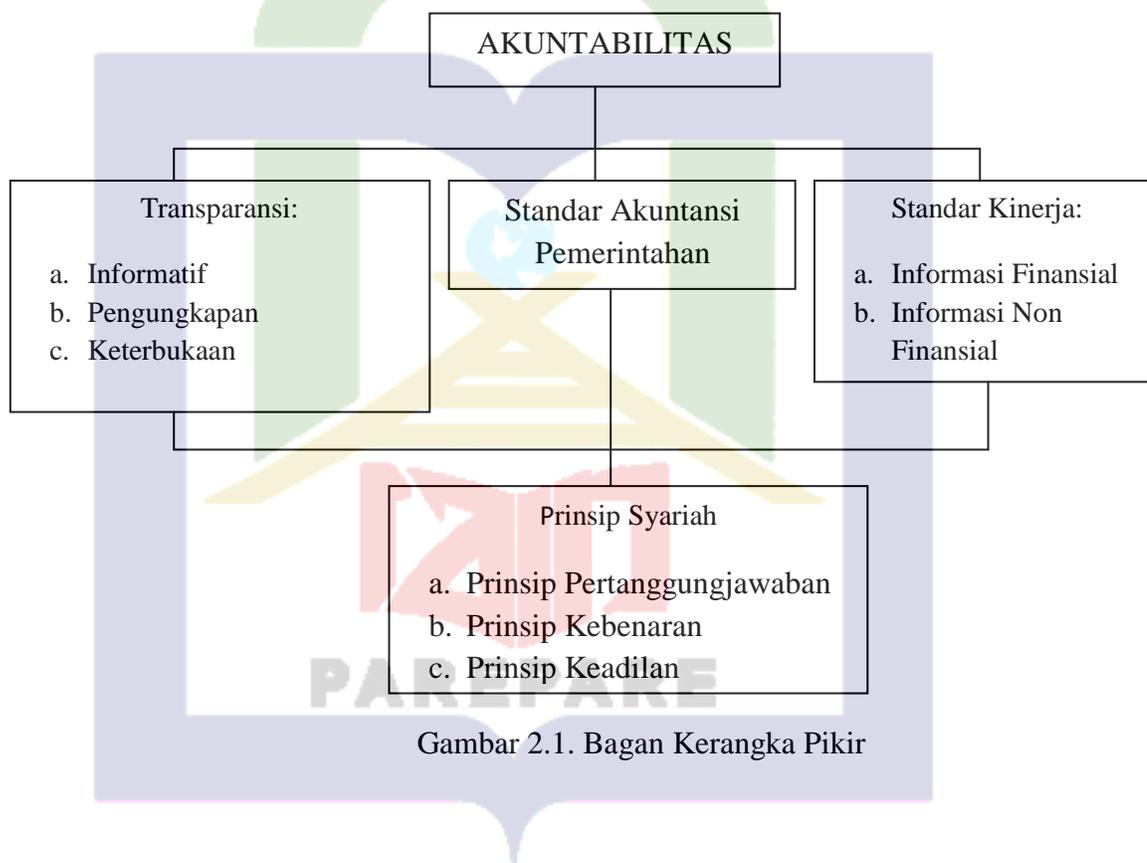
<sup>43</sup> Lantip Susilowati, ‘Tanggungjawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah,’ *An-nisbah*, 3 No. 2, 2017, h. 304.

<sup>44</sup> “Transparansi,” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Transparansi> (diakses 28 Desember 2020).

<sup>45</sup> Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta, Penerbit: Salemba Empat, 2009), h. 67.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian akan lebih terstruktur, sistematis dan tetap pada ruang lingkup. Untuk penelitian yang akan dilakukan, fokus pembahasannya mengenai Akuntabilitas Standar Keuangan Pemerintahan di Kota Parepare khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Adapun kerangka fikirnya sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir